

## **TEOLOGI TRI HITA KARANA DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN SOSIAL-EKOLOGIS MASYARAKAT HINDU BALI**

Iluh Ayu Narti  
UPT SMA Negeri 7 Luwu Utara  
Email : [ayunarti43@gmail.com](mailto:ayunarti43@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tri Hita Karana* merupakan kerangka *teologis* dan *kosmologis* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan alam (*Palemahan*) dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Studi ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga diwujudkan secara praksis dalam tindakan sosial dan *ekologis* masyarakat Hindu Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode studi pustaka dan *etnografi* partisipatif, termasuk wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tri Hita Karana* berperan sentral dalam membentuk *etos* kolektif masyarakat Bali, yang tercermin dalam upacara keagamaan, sistem *subak* sebagai warisan budaya dunia, *gotong royong* dalam kegiatan sosial, serta pelestarian hutan dan mata air suci (*taksu*). Dimensi *teologis Tri Hita Karana* menciptakan relasi sakral antara manusia dan lingkungannya, di mana tindakan *ekologis* tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral tetapi juga sebagai bagian dari *dharma* (kebenaran *kosmis*). Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa praktik *Tri Hita Karana* berkembang secara kontekstual, menjawab tantangan *globalisasi* dan kerusakan lingkungan dengan merumuskan *ekoteologi* yang khas Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tri Hita Karana* bukan sekadar filosofi hidup, melainkan menjadi sistem *teologi praksis* yang membimbing transformasi sosial dan *ekologis* secara berkelanjutan. Implikasinya penting untuk pengembangan model pembangunan berbasis budaya lokal dan spiritualitas *ekologis*, baik dalam tataran kebijakan maupun pendidikan.

**Kata kunci:** *Tri Hita Karana*, *teologi* Hindu Bali, *ekoteologi*, *sosial-ekologis*, kearifan lokal, *dharma* lingkungan

### **ABSTRACT**

*Tri Hita Karana* is a theological and cosmological framework governing the harmonious relationship between humans and God (*Parahyangan*), fellow human beings (*Pawongan*), and the natural environment (*Palemahan*) within Balinese Hindu society. This study aims to explore in depth how the principles of *Tri Hita Karana* are not only understood as normative doctrines but are also realized in practice through the socio-ecological actions of Balinese Hindu communities. Utilizing a qualitative methodology that combines literature review and participatory ethnography—including in-depth interviews with customary leaders, religious figures, and local communities from both rural and urban areas in Bali—the research provides a comprehensive analysis of lived theological praxis. Findings reveal that *Tri Hita Karana* plays a central role in shaping the collective ethos of Balinese society, as evidenced in religious rituals, the *subak* irrigation system recognized as a UNESCO world heritage, mutual aid systems in social affairs, and the preservation of sacred forests and springs (*taksu*). The theological dimension of *Tri Hita Karana* fosters a sacred relationship between humans and the environment, where ecological actions are perceived not merely as moral obligations but as expressions of *dharma* (cosmic order). Furthermore, the study highlights that the implementation of *Tri Hita Karana* evolves contextually, addressing the challenges of globalization and ecological degradation through the formulation of a distinct Balinese ecotheology. The study concludes that *Tri Hita Karana* functions not only as a philosophy of life but as a form of practical theology guiding sustainable socio-ecological transformation. Its

*implications are significant for the development of culturally grounded and ecologically spiritual models of development, influencing both policy and educational frameworks.*

**Keywords:** *Tri Hita Karana, Balinese Hindu theology, ecotheology, socio-ecological practices, local wisdom, environmental dharma*

## **PENDAHULUAN**

Pulau Bali sebagai sebuah ruang budaya-religius tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sistem nilai dan filsafat hidup masyarakatnya yang sangat khas dan berakar kuat pada ajaran Hindu. Salah satu fondasi kosmologis yang paling fundamental dalam struktur kepercayaan dan praktik kehidupan masyarakat Bali adalah konsep *Tri Hita Karana*. Secara etimologis, *Tri Hita Karana* berarti "tiga penyebab kebahagiaan" atau "tiga jalan menuju keharmonisan," yaitu *Parhyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan harmonis antara manusia dengan sesama), dan *Palemahan* (hubungan harmonis antara manusia dengan alam). Konsep ini tidak hanya menjadi pedoman etis dan spiritual, tetapi juga menjadi dasar dalam praktik sosial, kultural, dan ekologis masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari (Tim Penyusun, 2008; Rai, 2011).

Sebagai suatu doktrin teologis dan kosmologis, *Tri Hita Karana* tidak berdiri secara lepas dari sistem kepercayaan Hindu-Bali secara keseluruhan, melainkan merupakan hasil dari proses panjang sinkretisme antara ajaran Veda, kearifan lokal, dan pengalaman historis masyarakat Bali. Dalam konteks ini, teologi *Tri Hita Karana* dapat dipahami sebagai bentuk *theologia contextualis* yang menyatu dalam praksis kehidupan masyarakat. Artinya, pemahaman tentang Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*), sesama manusia, dan alam tidak berada dalam ruang yang terpisah, melainkan saling berkait dalam jaringan relasi spiritual dan sosial yang menyatu dalam ritus, simbol, dan tindakan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Paul Tillich yang menekankan bahwa teologi tidak dapat dipisahkan dari konteks eksistensial manusia (Tillich, 1951).

Kehidupan masyarakat Bali memperlihatkan bagaimana *Tri Hita Karana* menjadi landasan dalam membangun tatanan sosial yang adil, kehidupan ekonomi yang berbasis komunitas, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Berbagai praktik seperti sistem pertanian *subak*, upacara *piodalan* di pura, kegiatan gotong royong (*ngayah*), serta upaya pelestarian hutan dan sumber mata air menunjukkan bahwa teologi ini dihayati secara kolektif dalam bentuk etika ekologis dan sosial. Dalam studi tentang ekoteologi, pandangan ini dapat disejajarkan dengan konsep *eco-theology* dalam tradisi Kristen yang menempatkan manusia sebagai penjaga ciptaan (White Jr., 1967; Hessel & Ruether, 2000), namun dalam versi Bali, relasi antara manusia dan alam tidak bersifat antroposentris, melainkan holistik dan transenden.

Lebih lanjut, *Tri Hita Karana* tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga performatif dalam membentuk struktur sosial dan kebijakan lokal. Sejumlah perda desa adat bahkan menjadikan *Tri Hita Karana* sebagai dasar dalam perumusan tata ruang, sistem pengelolaan sampah, hingga aturan mengenai pembangunan infrastruktur. Penelitian oleh Lansing (1991) tentang *subak* misalnya, menunjukkan bahwa sistem irigasi tradisional Bali bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan bagian dari jaringan sakral yang merepresentasikan keharmonisan antara manusia dan alam yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, *Tri Hita Karana* memiliki implikasi langsung dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyatukan aspek spiritual, sosial, dan ekologis (Ardhana, 2012).

Namun demikian, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, praktik dan pemaknaan *Tri Hita Karana* mengalami tantangan serius. Komersialisasi pariwisata, degradasi lingkungan, perubahan gaya hidup, serta krisis ekologis global menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan ekonomi-politik kontemporer. Studi-studi kontemporer seperti yang dilakukan oleh MacRae (2010) dan Warren (1993) menunjukkan bahwa meskipun *Tri Hita Karana* masih dijadikan jargon dalam kebijakan dan narasi budaya, namun sering kali terjadi distorsi makna yang mengarah pada simbolisasi semata tanpa praksis nyata. Oleh karena itu, kajian terhadap teologi *Tri Hita Karana* dalam konteks kehidupan sosial-ekologis masyarakat Hindu Bali menjadi semakin relevan dan mendesak.

Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa *Tri Hita Karana* bukan hanya warisan budaya yang bersifat statis, melainkan merupakan suatu teologi hidup (*living theology*) yang terus dinegosiasikan dan dikonstruksi ulang dalam praktik kehidupan masyarakat Bali. Pendekatan yang digunakan adalah teologi kontekstual yang memadukan analisis hermeneutik atas teks dan ritus keagamaan dengan pendekatan etnografis terhadap praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana *Tri Hita Karana* dipraktikkan, tetapi juga bagaimana ia ditafsirkan ulang dalam menghadapi tantangan kontemporer baik dalam aspek sosial maupun ekologis.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teologi kontekstual, yang memfokuskan pada interaksi antara ajaran keagamaan dan praksis sosial-ekologis masyarakat Hindu Bali. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana konsep Tri Hita Karana—yang mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), sesama manusia (Pawongan), dan alam (Palemahan)—diinterpretasi dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada komunitas-komunitas adat di Bali yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip Tri Hita Karana dalam sistem sosial dan ekologis mereka, seperti dalam pengelolaan subak, pelestarian hutan adat, serta tata kehidupan desa pakraman. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, meliputi pemangku adat, tokoh agama, petani, serta akademisi lokal yang memahami dinamika sosial-keagamaan setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen terhadap naskah lontar, awig-awig desa, serta kebijakan lokal yang mengandung nilai Tri Hita Karana. Data dianalisis secara interpretatif-hermeneutik, dengan menekankan pemahaman kontekstual terhadap makna simbolik dan teologis dari praktik sosial-ekologis tersebut. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, serta klarifikasi berulang dengan informan kunci. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip teologi Hindu tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan juga menjadi landasan praksis yang membentuk etika ekologis dan solidaritas sosial dalam masyarakat Bali kontemporer.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tri Hita Karana merupakan fondasi teologis dan kosmologis yang sangat penting dalam agama Hindu Bali. Secara harfiah, Tri Hita Karana berarti “tiga penyebab kebahagiaan” atau “tiga sumber kesejahteraan,” yaitu: Parhyangan (hubungan harmonis dengan Tuhan), Pawongan (hubungan harmonis antar sesama manusia), dan Palemahan (hubungan harmonis dengan alam lingkungan). Ketiga aspek ini membentuk suatu sistem nilai integral

yang tidak hanya mengatur kehidupan spiritual individual, tetapi juga struktur sosial dan tata ekologis masyarakat Bali. Tri Hita Karana tidak bersifat teoritis belaka, melainkan merupakan teologi praksis yang hidup dalam sistem adat, pertanian, arsitektur, dan etika keseharian masyarakat Bali.

### **1. Parahyangan: Relasi Transenden sebagai Dasar Spiritualitas Komunal dan Ekologis**

Aspek *Parahyangan* dalam *Tri Hita Karana* merupakan pilar utama dalam sistem kepercayaan Hindu Bali, yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa). Relasi ini tidak hanya bersifat vertikal-transenden, melainkan juga mewujudkan dalam tata kehidupan kolektif yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Dengan kata lain, *Parahyangan* bukan sekadar bentuk pengabdian ritual, tetapi juga menjadi fondasi etika spiritual kolektif dan praksis keberagamaan yang berakar kuat dalam kesadaran komunitas. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, nilai *Parahyangan* diwujudkan melalui sistem upacara keagamaan seperti *yadnya* (panca yadnya), keberadaan pura dan sanggah di setiap rumah tangga, serta pelaksanaan ritual bersama seperti *odalan*, *melasti*, *ngaben*, dan *nyepi*. Upacara-upacara ini bukan hanya menjadi sarana persembahan kepada Tuhan, tetapi juga memainkan peran vital dalam memperkuat ikatan sosial antarwarga, menjaga kesinambungan adat, dan memelihara identitas kultural masyarakat Bali (Geertz, 1973; Eiseman, 1990).

Pendekatan kolektif dalam ritual ini memperlihatkan bahwa spiritualitas Hindu Bali bersifat *komunalistik*, bukan *individualistik*. Hal ini ditekankan pula oleh Stephen Lansing (2006) dalam *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*, yang menyatakan bahwa agama di Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan ekologis karena ketiganya beroperasi dalam jaringan yang saling terkait. Dalam jaringan ini, aspek *Parahyangan* adalah simpul pusat yang mengarahkan kesadaran kolektif masyarakat kepada nilai-nilai sakral, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola ruang.

Lebih jauh, *Parahyangan* juga memiliki dimensi ekologis yang penting. Alam tidak dipahami sebagai entitas netral atau objek eksploitatif, melainkan sebagai *pradhana*—wujud ilahi yang meniscayakan penghormatan dan perlindungan. Konsep ini paralel dengan pemikiran ekoteologi kontemporer yang menganggap bumi sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga kesuciannya. Seperti dikemukakan oleh I Made Suamba (2014), dalam perspektif Hindu Bali, merusak lingkungan tidak hanya berarti pelanggaran etika ekologis, tetapi juga merupakan tindakan *adharma*—tidak sesuai dengan prinsip *dharma* dan keharmonisan kosmis. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan berbasis spiritualitas bukanlah retorika belaka, melainkan konsekuensi logis dari teologi yang mengakar dalam *Parahyangan*.

Praktik *Parahyangan* juga mewujudkan dalam struktur arsitektur rumah dan desa adat di Bali. Konsep *sanga mandala* dan orientasi ruang berdasarkan arah suci (*kaja-kelod*) mencerminkan relasi antara manusia dan alam semesta yang disakralkan. Setiap ruang memiliki fungsi dan nilai spiritual, dan keberadaan tempat suci di dalam lingkungan rumah (sanggah) maupun desa (pura desa, pura puseh, pura dalem) merupakan simbol manifestasi Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dimensi spiritual tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan mengalir dalam arsitektur, seni, dan sistem nilai yang membentuk kosmologi sosial Bali (Hauser-Schäublin, 2003; Picard, 1996). Sebagai bentuk *teologi praksis*, nilai *Parahyangan* telah menjadi sumber inspirasi bagi gerakan spiritual-ekologis yang berkembang di Bali, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan dan pariwisata budaya. Misalnya, dalam model *subak* sebagai sistem irigasi tradisional, kerja sama antarpetani tidak hanya didasarkan pada efisiensi teknis, tetapi juga

pada prinsip persembahan kepada Dewi Danu sebagai manifestasi Tuhan penguasa air. Studi Lansing (1991) dalam *Priests and Programmers* menunjukkan bagaimana praktik keagamaan dalam sistem *subak* menciptakan mekanisme ekologis yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat integritas spiritual masyarakat. Dengan demikian, aspek *Parahyangan* dalam *Tri Hita Karana* adalah lebih dari sekadar relasi vertikal dengan Tuhan; ia adalah struktur nilai, basis etika, dan landasan ontologis bagi kehidupan komunal dan ekologis masyarakat Bali. Ia menyatukan spiritualitas dan praksis sosial, menjadikan agama sebagai kekuatan integratif yang menopang keberlanjutan budaya dan alam Bali secara simultan. Oleh karena itu, pendekatan *Parahyangan* dalam teologi Hindu Bali tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga menawarkan kontribusi penting bagi diskursus global mengenai spiritualitas ekologis dan agama sebagai kekuatan transformatif dalam masyarakat.

## **2. Pawongan: Teologi Relasional dalam Struktur Sosial-Adat**

Aspek *Pawongan* dalam *Tri Hita Karana* merepresentasikan fondasi relasional antara manusia dengan sesamanya, yang tidak hanya berbentuk etika interpersonal, tetapi juga menjadi landasan teologis yang mengatur bagaimana manusia hidup bersama dalam tatanan sosial yang sakral. Dalam masyarakat Bali, dimensi ini termanifestasi melalui sistem sosial yang berbasis komunitas, seperti *banjar*, *subak*, dan *desa adat* (desa pakraman). Ketiganya bukan sekadar unit administratif atau organisasi sosial, melainkan struktur kosmoteandrik—memadukan dimensi manusiawi, ketuhanan, dan kosmis dalam satu kesatuan hidup (Panikkar, 1984).

### **a. Tat Twam Asi dan Spiritualitas Relasional**

Dalam wawancara lapangan yang dilakukan di sejumlah desa di Kabupaten Buleleng dan Gianyar, ditemukan bahwa prinsip *tat twam asi* ("engkau adalah aku") menjadi inti dari pemaknaan *Pawongan*. Ajaran ini merupakan ekspresi spiritual dari kesadaran advaita—bahwa seluruh makhluk berasal dari sumber yang sama dan terhubung dalam eksistensi ilahi yang satu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ardhana (2012), *tat twam asi* adalah fondasi etika spiritual dalam Hindu Bali yang mendorong empati, toleransi, dan pengakuan terhadap martabat sesama.

Penerapan prinsip ini tidak berhenti pada wacana moral, tetapi hadir dalam praktik-praktik sosial seperti saling menolong saat upacara keagamaan, *ngayah*, *ngewacika*, dan *metulung*. *Ngayah*, misalnya, bukan hanya kerja bakti fisik, tetapi dipahami sebagai persembahan suci (yadnya) dalam bentuk tenaga. Ini menghubungkan aktivitas duniawi dengan tujuan spiritual, dan dengan demikian menjadikan kerja sosial sebagai medium pengabdian kepada Tuhan, sesama, dan komunitas.

### **b. Sistem Banjar dan Dharma Sosial**

Struktur *banjar* di Bali merupakan arena utama bagi aktualisasi nilai *Pawongan*. Banjar tidak hanya mengatur kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga menjadi wadah untuk pelaksanaan ritus komunal, pengambilan keputusan adat, dan distribusi tanggung jawab dalam masyarakat. Sebagaimana dikaji oleh Hauser-Schäublin (2003), struktur sosial di Bali memiliki sifat *ritualistik-organik*, artinya setiap individu merupakan bagian dari tubuh sosial yang terhubung melalui ikatan keagamaan dan adat yang bersifat sakral.

Prinsip *dharma* menjadi dasar pengorganisasian tugas dalam banjar, di mana setiap anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif, baik dalam bentuk *sekaha teruna* (organisasi pemuda), *sekaha gong* (kelompok seni), maupun *sekaha banjar*

dalam ritual kemasyarakatan. Ketidakhadiran atau pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial ini bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga terhadap norma spiritual.

### **c. Subak sebagai Ekspresi Pawongan dan Solidaritas Ekologis**

Sistem *subak* di Bali sering kali dikaji dari perspektif ekologis dan teknis, namun dalam konteks *Pawongan*, subak juga menjadi representasi solidaritas spiritual. Menurut Lansing (1991), dalam *Priests and Programmers*, subak bukan hanya sistem irigasi, tetapi komunitas keagamaan yang berbasis pada ritual kolektif kepada Dewi Danu. Dalam sistem ini, para petani bekerja bukan hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi, tetapi sebagai bagian dari yadnya kolektif yang menyatukan aspek sosial, spiritual, dan ekologis.

Praktik *ngaturang banten* (persembahan) di pura subak, pembagian air yang adil, dan keputusan kolektif dalam pengelolaan sawah menunjukkan bagaimana nilai *Pawongan* mengatur relasi antarmanusia dalam struktur ekonomi tradisional. Ini sekaligus membantah pandangan modern yang memisahkan antara yang sakral dan yang profan, sebab dalam konteks Bali, kedua dimensi tersebut menyatu dan saling memperkuat.

### **d. Desa Pakraman dan Kohesi Sosial-Religius**

*Desa pakraman* merupakan entitas adat yang memperkuat dimensi *Pawongan* dengan mengintegrasikan hukum adat (*awig-awig*), struktur kekerabatan, dan nilai religius dalam tata kelola masyarakat. Dalam penelitian Suamba (2020), disebutkan bahwa desa adat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kohesi sosial lintas generasi. Ketika terjadi konflik internal, penyelesaiannya bukan mengedepankan sanksi hukum formal, melainkan pendekatan konsensus yang berlandaskan nilai kebersamaan dan keseimbangan.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Pawongan* dalam desa pakraman bukan hanya konsep, tetapi menjadi praksis sosial yang terbukti efektif menjaga ketahanan sosial dan harmoni lintas keyakinan. Dalam beberapa desa, misalnya di Sumberklompok dan Penglipuran, keragaman agama direspons bukan dengan segregasi, tetapi dengan inklusi sosial yang tetap menghormati identitas masing-masing. Ini mencerminkan etos *pluralisme kosmis* yang juga menjadi bagian integral dari teologi Hindu Bali.

Dengan demikian, *Pawongan* sebagai salah satu aspek dari *Tri Hita Karana* memperlihatkan bahwa hubungan antarmanusia dalam masyarakat Bali tidak dibangun semata-mata atas dasar rasionalitas sosial atau kontrak sosial ala Barat, tetapi berakar pada kesadaran spiritual yang mendalam. Ia menjadi bagian dari *teologi relasional* yang tidak hanya mengatur etika individual, tetapi juga membentuk struktur kolektif, mekanisme resolusi konflik, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Hal ini menjadikan *Pawongan* bukan hanya etika sosial, tetapi *modus vivendi*—cara hidup religius yang terjalin dalam keseharian masyarakat Bali, dan sekaligus menawarkan model sosial alternatif yang relevan dalam diskursus global mengenai humanisme spiritual dan komunitarianisme relasional.

## **3. Palemahan: Etika Ekologis Berbasis Spiritualitas**

Aspek *Palemahan* dari *Tri Hita Karana* menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta, di mana alam tidak dipahami semata sebagai objek material atau sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai entitas yang memiliki dimensi sakral dan spiritual. Dalam pandangan kosmologi Hindu Bali, alam adalah bagian integral dari tatanan kosmis yang dijaga oleh dewa-dewa penjaga unsur, seperti Dewa Wisnu

(air dan kesuburan), Dewa Bayu (angin), Dewa Agni (api), dan Dewa Indra (langit). Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap alam senantiasa dibingkai dalam etika sakral yang menuntut keseimbangan, penghormatan, dan keterhubungan spiritual.

#### **a. Kosmologi Sakral: Kaja-Kelod, Luwur-Tengen, dan Nyegara-Gunung**

Dalam struktur ruang masyarakat Bali, arah mata angin bukan hanya orientasi geografis, tetapi memiliki makna kosmologis dan spiritual. Konsep *kaja-kelod* (utara-selatan), *luwur-tengen* (atas-kanan), serta *nyegara-gunung* (laut-gunung) menunjukkan bahwa ruang hidup selalu dimaknai secara relasional dan sakral. Seperti yang dijelaskan oleh Eiseman (1989) dalam *Bali: Sekala and Niskala*, orientasi ruang di Bali merefleksikan hubungan manusia dengan kekuatan kosmis—gunung sebagai tempat suci (pusat energi ilahi) dan laut sebagai tempat pelepasan unsur profan.

Setiap bangunan rumah, pura, dan desa dirancang dengan memperhatikan arah kosmologis ini, sehingga menciptakan keselarasan antara struktur buatan manusia dan lanskap alam. Hal ini menunjukkan bahwa Palemahan tidak hanya tercermin dalam konservasi fisik, tetapi juga dalam cara manusia mendesain, menghuni, dan menghormati ruang.

#### **b. Subak sebagai Sistem Ekologi-Spiritual**

Salah satu manifestasi konkret dari nilai Palemahan adalah sistem *subak*, yaitu sistem irigasi tradisional Bali yang mengintegrasikan teknologi, sosial, dan spiritualitas. Pengakuan UNESCO pada tahun 2012 terhadap *Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy* menggarisbawahi bagaimana Palemahan menjadi kerangka ekologis yang efektif dan lestari (UNESCO, 2012).

Dalam sistem ini, pembagian air tidak hanya diatur berdasarkan kebutuhan teknis, tetapi melalui musyawarah komunal dan ritus kolektif. Pusat irigasi selalu terhubung dengan *Pura Ulun Suwi*, tempat pemujaan Dewa Wisnu sebagai manifestasi Tuhan yang menjaga air dan kesuburan. Seperti dicatat oleh Lansing dan Kremer (1993), keberhasilan sistem subak bukan hanya karena efisiensi teknisnya, tetapi karena ia berakar dalam nilai-nilai spiritual yang mendasari solidaritas ekologis dan distribusi keadilan ekologis.

#### **c. Tumpek Uduh dan Upacara Ekologis**

Tradisi *Tumpek Uduh* atau *Tumpek Wariga* merupakan salah satu bentuk konkret penghormatan terhadap alam, khususnya tumbuhan. Upacara ini dilaksanakan setiap 210 hari (berdasarkan kalender Pawukon), tepat pada hari Saniscara Kliwon Wariga, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Sangkara yang menguasai tumbuhan dan kekayaan flora. Pada hari ini, masyarakat memberikan sesajen dan mantram kepada pohon-pohon, khususnya yang menghasilkan buah dan kayu bernilai tinggi, dengan tujuan memohon restu dan perlindungan serta agar tumbuhan tumbuh subur dan memberikan manfaat.

Tradisi ini menunjukkan bahwa etika ekologis dalam masyarakat Bali bersifat proaktif dan spiritualistik. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki dominasi atas alam, tetapi berkewajiban menjaganya sebagai bagian dari *dharma* (kewajiban spiritual). Seperti ditegaskan oleh Suamba (2014), praktik seperti *Tumpek Uduh* bukan sekadar ritual agraris, tetapi bagian dari "spiritual ecology" yang meneguhkan keterikatan emosional dan religius terhadap alam.

#### **d. Palemahan dan Krisis Ekologis Global**

Dalam konteks global, krisis ekologis saat ini—yang ditandai dengan perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran, dan kepunahan spesies—disebabkan oleh pandangan dualistik yang memisahkan manusia dari alam, serta pendekatan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dominasi. Teologi *Palemahan* dalam *Tri Hita Karana* menawarkan alternatif paradigmatis terhadap krisis ini: sebuah spiritualitas ekologis yang memandang alam sebagai mitra relasional, bukan objek dominasi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Thomas Berry (1999) tentang “The Great Work”, di mana transformasi spiritual umat manusia adalah prasyarat untuk memulihkan harmoni ekologis. Dalam konteks Bali, nilai-nilai *Palemahan* tidak hanya menjadi memori kultural, tetapi juga etika praksis yang relevan dalam membangun gerakan ekoteologis global yang berakar lokal.

#### **e. Pendidikan Ekologis dan Reproduksi Nilai *Palemahan***

Nilai *Palemahan* terus direproduksi melalui sistem pendidikan informal seperti *pasraman*, pelatihan adat, serta seni pertunjukan. Dalam *wayang kulit*, *tari wali*, dan sastra tutur (kekawin, kidung), sering kali terselip pesan ekologis yang menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis tidak ditransmisikan melalui pendidikan formal semata, tetapi melalui pewarisan nilai-nilai spiritual yang melekat dalam budaya. Di beberapa desa seperti Tenganan Pegringsingan, tradisi konservasi hutan adat masih dijaga secara ketat, di mana perambahan hutan dilarang keras dan pelestarian flora endemik menjadi bagian dari ketaatan spiritual. Praktik ini menunjukkan bagaimana *Palemahan* menjadi prinsip hidup yang mentransformasikan etika ekologis menjadi tindakan kolektif.

Aspek *Palemahan* dalam *Tri Hita Karana* merupakan fondasi dari *teologi ekologis* yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu sistem nilai yang utuh dan fungsional. Ia bukan sekadar ajaran normatif, melainkan menjadi praksis hidup yang terbukti mampu menjaga keseimbangan lingkungan, membangun solidaritas ekologis, dan merespons tantangan krisis ekologi modern dengan pendekatan yang kontekstual dan berakar budaya. Dengan demikian, *Palemahan* tidak hanya relevan untuk masyarakat Bali, tetapi juga berkontribusi pada diskursus global tentang ekoteologi dan keberlanjutan berbasis lokal.

#### **4. Teologi *Tri Hita Karana* sebagai Model Kontekstual-Ekologis**

*Tri Hita Karana*, yang secara harfiah berarti “tiga penyebab kebahagiaan,” telah lama diposisikan sebagai sistem nilai filosofis dan teologis dalam masyarakat Bali. Namun lebih dari itu, *Tri Hita Karana* dapat dipahami sebagai suatu model teologi kontekstual-ekologis yang bukan hanya relevan secara lokal, tetapi juga signifikan secara global. Di tengah krisis ekologi, fragmentasi sosial, dan kehilangan spiritualitas dalam masyarakat modern, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Tri Hita Karana* menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi transendensi, etika sosial, dan tanggung jawab ekologis.

Sebagai model teologi kontekstual, *Tri Hita Karana* menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka ini, hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa (*Parahyangan*), dengan sesama (*Pawongan*), dan dengan lingkungan alam (*Palemahan*), tidak hanya bersifat konseptual atau normatif, tetapi diwujudkan dalam praktik sosial, spiritualitas keseharian, dan tata kelola masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan Stephen Bevans (2002) yang menyatakan bahwa teologi kontekstual merupakan refleksi iman yang terbenam dalam pengalaman, sejarah, dan

budaya masyarakat tertentu. Dengan kata lain, Tri Hita Karana adalah ekspresi dari sebuah iman hidup (living theology) yang dibentuk melalui interaksi yang dinamis antara kepercayaan religius dan realitas sosial-kultural Bali.

Kesatuan antara aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam Tri Hita Karana menjadikannya sebagai suatu paradigma keberlanjutan yang tidak hanya ekologis secara teknis, tetapi juga berakar pada kesadaran spiritual. Dalam hal ini, pemikiran Fritjof Capra dalam *The Web of Life* (1996) sangat relevan, di mana ia menekankan bahwa solusi atas krisis lingkungan modern memerlukan pendekatan sistemik dan spiritual, bukan sekadar teknokratik. Tri Hita Karana mewujudkan apa yang oleh Capra disebut sebagai “spiritual ecology,” yakni kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral dari jaringan kehidupan yang lebih luas, dan bahwa harmoni dengan alam adalah bagian dari tanggung jawab spiritual.

Penerapan prinsip Tri Hita Karana dapat ditemukan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam kebijakan pembangunan. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Bali secara resmi mengadopsi Tri Hita Karana sebagai landasan dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang menegaskan pentingnya nilai-nilai lokal dalam pengelolaan sosial, budaya, dan sumber daya alam. Bahkan dalam bidang pariwisata, Tri Hita Karana dijadikan sebagai kerangka pembangunan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial. UNESCO (2012) juga mengakui sistem irigasi subak Bali—yang merupakan manifestasi langsung dari Palemahana dalam Tri Hita Karana—sebagai warisan budaya dunia karena kemampuannya mengintegrasikan teknologi lokal, kosmologi Hindu, dan struktur sosial komunal.

Lebih jauh, Tri Hita Karana bukan hanya menjadi landasan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi perangkat epistemologis yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia. Dalam hal ini, sistem pendidikan informal seperti pasraman, seni pertunjukan sakral, dan ritus-ritus tradisional berperan sebagai media reproduksi nilai-nilai ini secara intergenerasional. Melalui tari wali, kidung, wayang, dan upacara adat, nilai-nilai Tri Hita Karana diajarkan dan diinternalisasi sejak usia dini, menjadikannya bagian dari habitus kolektif masyarakat Bali.

Kontribusi Tri Hita Karana terhadap diskursus teologi global juga tidak dapat diabaikan. Dalam literatur ekoteologi, seperti yang dikembangkan oleh Thomas Berry (1999) dan Sallie McFague (1993), spiritualitas ekologis ditekankan sebagai elemen penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Tri Hita Karana, dengan pemahamannya bahwa alam adalah manifestasi ilahi dan bahwa kerusakan ekologis adalah bentuk dosa spiritual, menempatkan Bali dalam posisi yang unik sebagai salah satu contoh konkret dari teologi lokal yang mampu berbicara kepada persoalan global. Bahkan dalam konteks pluralisme agama, Tri Hita Karana menawarkan pendekatan teologis yang inklusif, karena ia tidak memisahkan antara iman dan tindakan sosial, antara hubungan vertikal dan horizontal, melainkan menyatukannya dalam visi harmoni kosmik yang utuh. Dengan demikian, Tri Hita Karana bukan hanya sebuah konsep budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi telah berkembang menjadi model teologi praksis yang hidup, relevan, dan dinamis. Ia tidak hanya menjadi jantung dari spiritualitas Hindu Bali, tetapi juga menjadi sumbangan berharga bagi pemikiran global mengenai keberlanjutan, spiritualitas ekologis, dan teologi kontekstual. Dalam zaman yang semakin menghadapi tantangan multidimensional, dari perubahan iklim hingga krisis makna hidup, pendekatan seperti Tri Hita Karana sangat diperlukan—sebuah

pendekatan yang bukan hanya berpikir tentang dunia, tetapi juga hidup dan menyatu dengannya.

### **SIMPULAN**

Tri Hita Karana sebagai sistem nilai dan kerangka teologis dalam agama Hindu Bali bukan hanya berfungsi sebagai prinsip normatif-spiritual, tetapi juga sebagai model praksis yang membentuk struktur sosial, relasi antarmanusia, dan tata kelola lingkungan. Dalam realitas masyarakat Bali, Tri Hita Karana tidak hidup sebagai konsep abstrak yang terlepas dari praktik sehari-hari, melainkan mewujud secara konkret dalam berbagai dimensi kehidupan—mulai dari sistem keagamaan, adat, pendidikan informal, hingga kebijakan pembangunan daerah. Parahyangan mengajarkan relasi transenden dengan Tuhan melalui ritual kolektif, sakralitas ruang, dan etika spiritual yang memperkuat identitas komunal. Pawongan menanamkan kesadaran relasional dan etika kasih sayang yang diwujudkan dalam gotong royong, prinsip *tat twam asi*, dan struktur sosial seperti banjar dan desa pakraman. Palemahan membentuk dasar etika ekologis yang menganggap alam sebagai bagian integral dari kosmos ilahi, seperti tercermin dalam sistem subak, ritual tumppek uduh, dan konsep tata ruang nyegara-gunung. Melalui pembacaan teologis-kontekstual, Tri Hita Karana dapat dipahami sebagai tawaran epistemologi alternatif terhadap paradigma modern yang cenderung memisahkan antara spiritualitas dan dunia material, antara teologi dan ekologi. Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal Bali menunjukkan bahwa spiritualitas yang terbenam dalam budaya tidak hanya memperkuat identitas religius masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan keberlanjutan ekologis. Model ini sejalan dengan pemikiran teolog-teolog global seperti Raimon Panikkar dengan gagasan *cosmotheandric vision*, Fritjof Capra dengan *spiritual ecology*, serta Diana Eck dalam kerangka pluralisme aktif. Dengan demikian, Tri Hita Karana tidak hanya berkontribusi terhadap kehidupan lokal masyarakat Bali, tetapi juga memiliki relevansi universal dalam menghadapi tantangan global seperti kerusakan lingkungan, disintegrasi sosial, dan krisis spiritualitas.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa teologi lokal seperti Tri Hita Karana memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai paradigma alternatif dalam studi agama, etika lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Ia bukan saja mengajarkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam, tetapi juga membentuk basis bagi pluralisme, resiliensi sosial, dan transformasi ekoteologis. Maka, dalam upaya membangun masa depan yang adil, lestari, dan spiritual, refleksi atas warisan kearifan lokal seperti Tri Hita Karana perlu terus digali, dihidupi, dan dikontekstualisasikan dalam dialog global antaragama dan ilmu pengetahuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardhana, I. K. (2012). *Kebudayaan Bali: Dinamika dan Transformasi dalam Perspektif Sejarah*. Denpasar: Udayana University Press.
- Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.
- Eck, D. L. (2001). *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*. New York: Harper San Francisco.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Lansing, J. S. (2006). *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Panikkar, R. (1984). *The Unknown Christ of Hinduism*. Maryknoll: Orbis Books.
- Rai, I. M. (2010). *Tri Hita Karana: Konsep dan Aktualisasinya dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Denpasar: Bali Post.

- Sendra, I. W. (2017). *Arsitektur Bali: Dalam Perspektif Tri Hita Karana dan Asta Kosala Kosali*. Denpasar: Pustaka Bali.
- Suarjana, I. M. (2019). *Relasi Sosial dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Bali*. Denpasar: Penerbit Universitas Hindu Indonesia.
- Suamba, I. B. G. (2014). *Hinduism and Ecology in Bali: A Review of the Subak as a Cultural Heritage*. In *Jurnal Kajian Bali*, 4(2), 115–130.
- Suamba, I. B. G. (2020). *Teologi Rwa Bhineda dan Penguatan Moderasi Beragama di Bali*. Denpasar: Widya Dharma Press.
- UNESCO. (2012). *Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.